



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU WAHYUDI
2. Jabatan : DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 144683

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 43.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 798 m²/160 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m²/185 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99800 m²/48 m² di BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/56 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m²/84 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m²/180 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m²/180 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m²/180 m² di KOTA PALEMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
9. Tanah Seluas 1011060 m² di BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
10. Tanah Seluas 20000 m² di LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 20000 m² di OKU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp.



200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI

Rp. 110.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2010, HASIL

SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

3.150.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

60.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.007.865.000

F. HARTA LAINNYA

Rp.

180.000.000

Sub Total

Rp.

48.047.865.000

III. HUTANG

Rp.

34.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

48.013.865.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.